
SEJARAH RADIKALISME KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT ABANGAN DI SOLO, JAWA TENGAH

Yudi Setianto

Departemen Sejarah pada Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur

Email: yudiroyan@gmail.com

Artikel info

Keywords:

Radicalism, Religion, Abangan

Abstract. *This paper aims to examine and examine the history of the development of religious radicalism in Solo, Central Java. The method used in this paper is a historical research method. The results of this study indicate that the Islamic radicalism movement in Solo began with the fall of the PKI's power in 1965. The Solo area, during Sukarno's reign, was dominated by the political power of the PKI. The dominance of the PKI Solo suppressed all the strength of the elements of the Muslim movement. After Sukarno's power ended and the New Order regime emerged, the forces of puritan Islam in Solo began to emerge. The emergence of this movement could not be separated from the figure of Natsir, an important figure of the Masjumi Party which Sukarno had dissolved. This Natsir established a relationship with influential local figures, namely Ustaz Abdullah Sungkar and Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. These two ustaz gained followers from various circles, including the santri and abangan, because of their courage in opposing the forces of the New Order.*

Abstrak. *Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah perkembangan radikalisme keagamaan di Solo, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan radikalisme Islam di Solo berawal dari tumbangannya kekuatan PKI di tahun 1965. Wilayah Solo, pada masa pemerintahan Sukarno didominasi kekuatan politik PKI. Dominasi PKI Solo ini menekan semua kekuatan elemen gerakan umat Islam. Setelah Kekuasaan Sukarno berakhir dan muncul rezim Orde Baru, kekuatan Islam puritan di Solo mulai muncul. Kemunculan gerakan ini tak lepas dari sosok Natsir, tokoh penting Partai Masyumi yang telah dibubarkan Sukarno. Natsir ini menjalin hubungan tokoh lokal berpengaruh yakni Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Kedua ustaz ini mendapat pengikut dari berbagai kalangan, termasuk kaum santri dan abangan, karena keberaniannya dalam menentang kekuatan Orde Baru.*

Corresponden author:

Email: yudiroyan@gmail.com

A. Pendahuluan

Secara historis, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung damai dan meluas.¹

Damai hakekatnya penyebaran Islam dilakukan melalui saluran-saluran non-konflik antara juru dakwah dari luar dengan penduduk pribumi.² Meluas artinya

¹ Menurut Afif Muhammad, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur kultural sehingga hadir secara damai tanpa gejolak. Karena watak kultural tersebut, Islam dapat berkembang dengan pesat (Muhammad, 2013: 44).

² Hal ini berbeda dengan islamisasi di wilayah seperti Persia dan India, yang mana proses islamisasi menggunakan ekspansi militer dan kekuatan Islam politik dari Asia Barat. Tidak ada

mayoritas daerah di Nusantara terjangkau proses islamisasi meskipun tidak seluruh wilayah. Secara sosio-politis, agama Islam juga mempengaruhi corak negara tradisional di Nusantara sehingga muncul kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Indonesia bersifat dinamis, dari masa kerajaan tradisional sampai dengan kini.

Salah satu kerajaan tradisional Islam yang masih mudah ditelusuri jejaknya adalah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara. Kerajaan-kerajaan ini sebagai kelanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Sebagaimana diketahui, kerajaan Mataram Islam telah terpecah menjadi empat kekuasaan tradisional, yakni Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti. Selanjutnya, pada tahun 1757, Kasunanan Surakarta terpecah lagi dengan Pura Mangkunegaran melalui Perjanjian Salatiga. Berikutnya, Kasultanan Yogyakarta terpecah dengan Pakualaman pada tahun 1813.

Berbagai permasalahan radikalisme Islam di Indonesia, sering dikaitkan dengan wilayah Solo di Jawa Tengah. Wilayah ini mempunyai tingkat eskalasi tinggi terkait gerakan radikalisme Islam. Hal ini tentunya sebagai hal yang paradoks, mengingat masyarakat Solo juga dikenal memegang etika Jawa, yang menjauhi diri dari perilaku kekerasan, dan mengedepankan sikap halus dalam tingkah laku dan bertutur kata. Namun, ideologi “santri” radikal dapat tumbuh subur di tengah masyarakat abangan.³

satupun wilayah di Kepulauan Melayu-Indonesia yang mengalami islamisasi dengan kekuatan militer (Azra, 2002: 18). Dalam bahasa asing, proses masuknya Islam dengan cara damai disebut juga dengan *penetration pacifique*. Agen-agen islamisasi di wilayah Nusantara adalah para pedagang, guru-guru sufi, dan pengembara; bukan dilakukan oleh para laskar-laskar Muslim dari Timur Tengah (Azra, 2006: 76). Hal ini yang dimaksud bahwa proses islamisasi di Nusantara terjadi secara damai.

³ Abangan dalam konteks modern disini adalah Islam KTP atau Muslim Nominal, mereka yang mengaku Muslim namun tidak taat menjalankan aturan agama.

Terkait dinamika perkembangan gerakan Islam di wilayah Solo atau Surakarta, sebagai hal yang menarik. Wilayah yang sebelumnya dipengaruhi kultur Islam kerajaan tradisional dengan didominasi masyarakatnya yang abangan, pada perkembangannya melahirkan gerakan Islam progresif bahkan revolusioner atau radikal. Hal ini dimulai pada pasca tumbangannya dominasi kekuatan PKI di tahun 1965. Namun demikian, di masa Orde Baru yang dikenal sebagai rezim yang semi-otoriter, gerakan radikalisme keagamaan di Solo ini semakin meningkat. Padahal selama ini muncul anggapan bahwa tumbangannya dominasi politik PKI tahun 1965 disebabkan kerja sama kekuatan militer dan elemen umat Islam.

B. Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Metode ini merupakan instrument untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Metode ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian di masa lampau. Sementara metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975: 32).

Langkah-langkah dalam penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, meliputi: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi. Heuristik dalam konteks ini mencari jejak-jejak perkembangan Islam radikal di Solo. Sumber penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder. Kajian penelitian berupa sejarah kontemporer maka sumber primer berupa wawancara terhadap pelaku atau saksi sejarah yang sampai sekarang masih hidup. Sumber sekunder diperoleh dari buku atau artikel penunjang, dan juga hasil penelitian lain yang relevan. Langkah berikutnya berupa kritik sumber yang terdiri atas kritik internal dan eksternal dengan tujuan untuk seleksi dan komparasi data yang ada. Langkah ketiga berupa interpretasi, yang berhubungan dengan menafsirkan makna dari hakekat

fakta-fakta sejarah yang ada. Langkah berikutnya adalah historiografi, sebagai fase penyajian data berupa kisah kronologis dan holistik dari tema pokok penelitian.

C. Pembahasan

Gerakan Islam Puritan Pasca G30S 1965 di Solo

Sesungguhnya jika memahami realitas sosio-historis sejak awal abad ke-20, wilayah Solo sudah sering diguncang gejolak sosial yang berujung pada tindak kekerasan. Kerusuhan anti-Cina, revolusi sosial anti-swapraja, sampai konflik antar pendukung partai politik mewarnai perjalanan sejarah wilayah ini (Fahrizal, 2020:63). Tindakan kekerasan dan konflik sosial ini terkait berbagai masalah seperti permasalahan sosial, budaya, agama, dan politik. Di samping itu, di wilayah ini juga sering muncul gerakan radikalisme Islam, di tengah masyarakat yang cenderung bersandar pada kultur abangan.

Sejak lama, Solo dianggap sebagai sarang radikalisme sosial dalam berbagai bentuknya. Radikalisme ini terwujud dalam berbagai bentuk gerakan dengan ideologi yang kompleks. Pada awal abad ke-20 radikalisme rakyat Solo mewujud dalam bentuk gerakan anti-Cina yang dimotori Sarekat Islam (SI) dan kemudian gerakan anti-kolonialisme, kapitalisme, dan feodalisme di bawah PKI. Pada pertengahan abad ke-20 radikalisme di Solo mengambil bentuk gerakan anti-swapraja yang berhasil menghapuskan kekuasaan keraton baik Kasunanan maupun Mangkunegaran. Selanjutnya di era kemerdekaan ini PKI berhasil membangun basis yang solid di Solo sehingga Solo dikenal sebagai “daerah merah”. Setelah hancurnya PKI dan berakhirnya rezim Demokrasi Terpimpin muncul lagi satu bentuk radikalisme lainnya, kali ini di bawah bendera Islam. Pada akhir 1970-an muncul kasus “Komando Jihad” yang menyeret sejumlah tokoh Islam di kota ini ke meja pengadilan dengan tuduhan subversif, berlanjut dengan timbulnya gerakan usroh pada dekade 1980-an yang menjadi cikal-akal dari Jama’ah Islamiyah atau JI (Fahrizal, 2020:63).

Jika menyangkut radikalisme keagamaan, gerakan radikalisme Islam di Solo muncul dan berkembang sejak akhir tahun 1970-an atau awal 1980-an, saat dunia

masih diliputi Perang Dingin. Hal ini berarti kemunculan gerakan tidak terkait dengan kerangka pikir Samuel Huntington tentang *the clash of civilizations*. Dalam konteks lokal di Solo, radikalisme Islam dihubungkan dengan perbedaan antara implementasi budaya Jawa dengan pandangan Islam puritan serta munculnya misi kristenisasi di Solo setelah peristiwa G-30-S tahun 1965. Sebagian dari kelompok puritan ini bertransformasi dalam ideologi radikal.

Berdasarkan perjalanan sejarah pada masa sebelum rezim Orde Baru berkuasa, PKI menjadi organisasi politik dominan di Solo. Kondisi sosio-politik ini dapat dianalisis dari situasi sebelumnya, yakni kekuatan partai politik berdasarkan hasil Pemilu I tahun 1955. Karakter pemilih suara pada pemilu di Jawa, provinsi Jawa Tengah, dan Kota Surakarta dapat menjadi pembanding sekaligus analisis dari situasi politik lokal saat itu. Di tingkat Jawa Tengah untuk suara empat besar, PNI menjadi partai pemenang dengan persentase hasil pemilu 33,5 %, berikutnya disusul PKI 25,8 %, Partai NU, 19, 7%, dan Masyumi 10,0 %. Untuk Karesidenan Surakarta kemenangan diperoleh Partai Komunis dengan total suara mencapai 736 ribu suara disusul oleh PNI sebesar 595 ribu suara, Masyumi 198 ribu suara dan NU memperoleh suara sebesar 45 ribu suara.

Kemenangan PKI di Karesidenan Surakarta pada pemilu tahun 1955 menurut Herbert Feith disebabkan, daerah Karesidenan Surakarta telah mengalami kemiskinan yang ekstrem, pertanian yang mundur dan terjadi ledakan penduduk. Sedangkan untuk daerah di pesisir selatan termasuk juga Kota Solo dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang gersang dan umumnya tidak mampu untuk memenuhi penduduknya akan kebutuhan beras. Selain itu juga, jumlah petani yang tidak mempunyai tanah semakin meningkat dalam kehidupan ekonomi desa. Hal ini disebabkan oleh dampak dari masa pendudukan Jepang yang menimbulkan kerusakan materil dan ekonomi serta perubahan sosial. Kerusakan ini menimbulkan banyak pemuda desa yang tak tertampung di desa sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, para pemuda desa pergi keluar desanya untuk mencari pekerjaan (Feith, 1999: 125).

Sementara itu, PNI memperoleh dukungan dari *elite* tradisional Jawa berpendidikan dan berkat Marhanisme serta figur Bung Karno mendapat dukungan lapisan bawah (Islam nominal). Selama revolusi, partai ini berkembang luas dan mendapat dukungan dari elite administrasi dan petani abangan di Jawa (Ahmad, 2016: 54). PKI mendapat dukungan mayoritas dari non-santri terutama massa pedesaan. Masyumi di Jawa dikenal kosmopolitan, kota dan cenderung berdagang, sehingga mendapat dukungan dari Muhammadiyah atau santri di perkotaan. NU dikenal bersifat pedesaan dan banyak dipengaruhi unsur kejawaan, sehingga mendapat dukungan santri dari pedesaan (Haryanto, 1991:39-46).

Dalam konteks Pemilu I, khususnya massa akar rumput masyarakat Jawa yang tidak berpendidikan, permasalahan ideologi politik sebenarnya sebagai hal yang kabur dan bias. Berdasarkan penelitian Sutiyah, janji PKI dengan semboyannya “sama rata sama rasa” akan membagikan tanah pada rakyat sangat tepat sekali untuk massa bawah pada masa itu, karena harapan massa bawah untuk bisa melepaskan kemiskinannya dengan cara memiliki tanah. Tampaknya, janji PKI cukup ampuh memikat rakyat, sehingga massa arus bawah memilih PKI bukan karena memahami ideologi partai. Keberpihakan kepada PKI karena masyarakat menganggap partai tersebut akan memberi sesuatu yang sangat dibutuhkan, yaitu kepemilikan atas tanah (Sutiyah, 2017: 204).

Meskipun Surakarta adalah perkotaan, sehingga kepemilikan atas tanah tidak berlaku sebagaimana di pedesaan, suara pemilih untuk PKI di tahun 1955 sangat dominan dan mampu mengalahkan PNI. Secara umum untuk tingkat provinsi, partai dengan ikon Sukarno tersebut secara umum unggul di Jawa Tengah, dan menempatkan PKI pada urutan kedua. PNI Di Jawa Tengah memperoleh suara 33,5%, PKI 25,8 %, NU 19,7% dan Masyumi 10,0%. Sementara untuk tingkat yang lebih mikro, khususnya kota atau kabupaten, jumlah suara terbesar di Surakarta adalah PKI (76.283 suara), PNI (32.870 suara), Masyumi (15.364 suara), dan NU (1.462 suara). Hal ini menunjukkan bahwa Surakarta sebagai salah satu basis utama

PKI di Jawa Tengah, dan kekuatan politik santri sangat minim.

Dominasi PKI di Surakarta sebagai hal yang wajar, karena gerakan kekuatan massa PKI sudah *start* jauh sebelum pemilu 1955. Sebelum Indonesia merdeka yakni pada masa pergerakan nasional, PKI telah menemukan momentum di wilayah ini. Momentum tersebut terjadi ketika organisasi besar Sarekat Islam yang berbasis di Solo mengalami penurunan peran, sementara tokoh-tokoh beraliran kiri radikal bermunculan seperti Mas Marco Kartodikromo, Semaun, dan tokoh fenomenal Haji Misbach. Sebagaimana diketahui, Haji Misbach merupakan tokoh lokal yang kontroversial dan unik. Dirinya berlatar belakang penceramah dan berpendidikan pesantren namun dikenal sebagai tokoh komunis lokal yang sangat berpengaruh.

Berdasarkan catatan historis, massa pendukung PKI di Solo berjumlah banyak dapat dilihat saat peristiwa pemberontakan PKI pada masa Hindia Belanda. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1926-1927 dengan pusat pemberontakan di Sumatra Barat dan Banten. Saat pemberontakan, PKI Solo juga akan melancarkan pemberontakan namun dapat diantisipasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hampir 1.000 orang ditangkap dan tokoh-tokoh penting PKI Surakarta diasingkan ke Digul (Shiraishi, 1997:468). Tertangkapnya ribuan tokoh dan pendukung PKI ini, mengindikasikan bahwa sejak masa pra-kemerdekaan, PKI telah mempunyai massa dengan jumlah besar di Solo.

Demikian juga pada masa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, meski pusat pemberontakan berada Jawa Timur, yakni wilayah Madiun namun rancangan gerakan berada di Solo. Pada bulan September 1948 PKI membuat kekacauan di Solo dengan serangkaian tindakan-tindakan penculikan terhadap lawan politiknya. Jika Yogyakarta pada tahun 1946 sampai akhir revolusi dijadikan tempat pusat pemerintahan Republik, maka Kota Solo menjadi basis bagi kelompok oposisi dan militer yang menentang pemerintah. Dalam rangka meredam konflik di Solo, Presiden Sukarno mengumumkan “keadaan bahaya” untuk Solo dan sekitarnya serta mengangkat Kolonel Gatot

Sobroto sebagai Gubernur Militer wilayah tersebut serta dibantu dengan kedatangan prajurit divisi Siliwangi. Puncak dari krisis tersebut ketika tanggal 18 September PKI memproklamkan berdirinya Republik Sovyet Indonesia di Madiun.

Selanjutnya, pada saat meletus peristiwa G-30-S tahun 1965 dengan episentrum peristiwa di Jakarta, situasi Kota Solo juga sangat mencekam. PKI beserta massanya melakukan intimidasi, represif, dan pembunuhan terhadap individu ataupun organisasi yang terkait dengan kaum santri seperti aktifis atau pendukung Masyumi dan Muhammadiyah. Menurut tokoh Muslim ternama di Solo yakni Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, berdasarkan ingatannya dinamika konflik antara santri dan massa PKI Solo di era pemerintahan Sukarno, secara umum di tahun 1955, massa PKI di Solo sangat dominan dan teramat kuat. Umat Islam di Solo diintimidasi dan ditekan oleh kekuatan PKI. Bagi PKI, masyarakat Muslim dianggap sebagai penghalang utama dalam mewujudkan ide dan cita-cita besar PKI di Jawa. Berbagai elemen umat Islam di Solo meskipun "minoritas" tetap berusaha melawan kekuatan besar massa PKI yang didukung birokrat lokal saat itu".⁴

Dominasi kekuatan PKI di Solo didukung oleh pimpinan lokalnya yakni Wali Kota Solo saat itu, Oetomo Ramelan (Wali Kota Surakarta 1958-1965). Oetomo Ramelan berani secara terus terang menyatakan dukungannya pada aksi kudeta pada bulan Oktober tahun 1965 di Jakarta. Hal ini menambah situasi semakin mencekam. Situasi masyarakat sipil yang demikian bertambah mencekam ketika salah satu kesatuan TNI-AD di Solo terinfiltrasi pengaruh PKI dalam Peristiwa 444 atau "empat reteng". Pasukan Batalyon 444 Brigif 6 yang bemarkas di pusat kota yakni di Benteng Vastenberg terlibat konflik dengan masyarakat sipil anti-PKI. Konflik bermula ketika masyarakat yang akan menyambut

kedatangan pasukan RPKAD (Kopassus) di sepanjang jalan dari arah Kartasura sampai pusat kota Solo, tiba-tiba muncul tembakan yang diduga dilakukan pasukan Batalyon 444. Masyarakat yang awalnya bersemangat menyambut RPKAD, kocar kacir menyelamatkan diri. Dalam insiden ini terdapat beberapa orang yang meninggal serta puluhan orang terluka. Akhirnya, Benteng Vastenberg dikepung pasukan RPKAD dan keadaan dapat dikendalikan (Mulyadi, *et al*, 1999:322-323).

Pada awalnya tentara Batalyon 444 serta massa PKI tampak beringas kepada masyarakat yang dianggap anti-PKI. Pasukan tersebut berubah *cooling down* ketika RPKAD datang. Beberapa pasukan RPKAD melempar baret merahnya ke arah Benteng Vastenberg. Pelemparan baret ini memaksa pasukan Batalyon 444 menghentikan aksi dan intimidasinya terhadap masyarakat sipil. Lemparan baret merah sebagai bahasa simbol, bahwa baret setara dengan nyawa. Artinya, pasukan RPKAD siap mempertaruhkan apa saja jika pihak lain meneruskan aksinya.⁵

Setelah peristiwa tahun 1965, kekuatan PKI secara nasional melemah termasuk di Kota Solo. Wilayah ini segera berbenah dengan situasi dan suasana sosio-politik baru. Dengan lemahnya pengaruh PKI, berkembanglah dakwah Islam di Solo dan membuka jalan bagi tumbuhnya pelbagai kelompok Islam dengan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya (Fahrizal, 2020:64). Salah satu kelompok Islam yang muncul dan berkembang di Solo adalah kelompok Islam dengan karakteristik puritan. Kekuatan Islam puritan bangkit untuk mengambil momentum masa transisi sosio-politik nasional. Momentum ini tentunya juga diambil di beberapa daerah, meskipun dengan karakter dan wujud yang berbeda-beda.

Gerakan Radikalisme Keagamaan Melawan Orde Baru di Solo.

Pada masa awal Orde Baru berdiri tiga gerakan Islam puritan di Solo yaitu

⁴ Wawancara peneliti dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, tanggal 6 Maret 2021. Meskipun peneliti mendapat informasi dari berbagai sumber terjadinya pembunuhan terhadap umat Islam dan kelompok anti-PKI yang dilakukan oleh massa PKI, namun Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah melihat terjadinya pembunuhan itu. Yang dilakukan massa PKI hanya sebatas intimidasi dan tekanan psikologis kepada umat Islam.

⁵ Wawancara peneliti dengan Pak Karim yang menyaksikan langsung peristiwa di Benteng Vastenberg tahun 1965 tersebut. Wawancara tanggal 6 Maret 2021.

Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) didirikan oleh Abdullah Thufail, gerakan Jamaah Al-Islamiah didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Majelis Pengajian Islam (MPI) didirikan Abdullah Marzuki. Ketiga gerakan ini menganut ideologi puritanisme Islam (Jinan, 2014: 382). Secara lokal, Islam puritan di Solo menghadapi tantangan menarik yakni tradisi Jawa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam serta merebaknya upaya kristenisasi. Para kelompok Islam puritan atau “santri pembaharu” mulai aktif membuat jaringan dalam rangka program santrinisasi. Sebaliknya, golongan abangan cenderung pasif dalam membangun jaringan sosial dan politik, sebagai dampak trauma sosio-politik peristiwa G-30-S tahun 1965.

Dalam situasi demikian, berkembangnya gerakan Islam pembaharu seolah tanpa hambatan. Jika memahami perjalanan sejarah sebelumnya, terkait golongan Islam modern atau pembaharu di Solo, Robert van Niel mengatakan jika Solo sebagai daerah dengan ikatan dengan tradisi Jawa yang kuat yang juga merupakan suatu daerah misi kristenisasi yang juga kuat. Hal ini menambah tantangan bagi gerakan Islam. Hal ini dalam konteks pada masa pergerakan nasional, saat munculnya organisasi Sarekat Islam (Niel, 1984: 126).⁶

⁶ Kristenisasi di Indonesia pada masa Hindia Belanda semakin marak ketika partai berasaskan agama Kristen di Belanda menguasai parlemen dalam pemilu parlemen tahun 1909. Mulai tahun 1909 kelompok misi Kristen dengan cepat meluas di Nusantara. Pembatasan jumlah dan tempat misi Kristen dihapus sehingga seluruh wilayah Indonesia terbuka bagi misi Kristen (Niel, 1984:116). Di Hindia Belanda, prinsip netralitas terhadap agama ditegakkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal penjajahannya. Dalam perkembangannya prinsip tersebut terkikis karena dinamika sosial-politik menjelang abad XX, tatkala koalisi partai-partai agama di Belanda (Katholik dan Kristen) memperoleh kemenangan di parlemen negeri Belanda (Saerozi, 2004: 128). Berdasarkan hasil penelitian Takashi Shiraishi, tokoh Islam di Solo yang revolusioner yakni Haji Muhammad Misbach pada tahun 1915 menerbitkan jurnal Medan Moeslimin, sebagai tanggapan atas penerbitan sejenis yakni Mardi Rahardjo, yang dikelola oleh para misionaris Kristen (Shiraishi, 1997: 108). Hal ini

Dengan melemahnya dominasi PKI, memberi kesempatan dan keleluasaan kepada para da'i menyampaikan pesan keagamaan. Berbagai gerakan dan organisasi keislaman puritan berkembang dengan pesat di Solo. Gerakan Islam menjadi sangat marak, ketika pengaruh PKI di Solo sudah lenyap. Apalagi, partai Masyumi sudah dibubarkan oleh Soekarno, sehingga para simpatisan atau pendukungnya yang berada di Solo mencari lahan dakwah melalui berbagai kegiatan keagamaan non-politik.⁷

Aktifitas dakwah mantan pengurus Masyumi juga dilakukan dalam rangka menghadang laju program kristenisasi. Dalam pidatonya di akhir tahun 1960-an, Muhammad Natsir berkunjung ke Solo, dan meminta rekan eks-Masyumi untuk lebih banyak mendirikan pesantren dan rumah sakit di Solo sebagai bentuk perlawanan terhadap kristenisasi. Berdirinya Pesantren Al-Mukmin, Ngruki serta dibangunnya rumah sakit Islam seperti RS Kustati dan RS Yarsis, merupakan jawaban atas permintaan Natsir tersebut (Wildan, 2014:275).

Setelah peristiwa G-30-S tahun 1965, identifikasi dengan agama mendadak menjadi hal yang sangat penting, bahkan menyangkut hidup dan mati. Dampaknya adalah banyak orang yang semula tergolong Muslim nominal atau abangan berusaha menunjukkan dirinya sebagai Muslim yang taat. Tujuannya tentu agar tidak dicap sebagai PKI. Jumlah jamaah shalat Jum'at dan pengajian meningkat. Momentum ini dimanfaatkan oleh para aktivis Islam di Solo salah satunya lewat pengajian kuliah zuhur di serambi Masjid Agung Kasunanan Surakarta yang diisi para mubaligh yang ada di Solo (Fahrizal, 2020:65). Pengajian kuliah dzuhur di serambi Masjid Agung Kasunanan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Pesantren Al-Mukmin, Ngruki dengan tokoh utamanya Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Usaha-usaha islamisasi di Solo diintensifkan dengan menggelar berbagai

menunjukkan jauh sebelum masa kemerdekaan, Solo sudah marak program kristenisasi.

⁷ Wawancara peneliti dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tanggal 6 Maret 2021.

kegiatan pengajian lebih banyak dilakukan oleh kaum modernis Islam. Sebaliknya, Islam tradisional seperti NU dari masa itu sampai sekarang tidak menonjol. Pada tahap awal, Pesantren Jamsaren dengan tokohnya Kiai Jamaluddin (wafat tahun 1995) adalah sosok yang sangat berpengaruh. Namun Abu Bakar Ba'asyir kurang mengganggap ketokohnya karena Kiai Jamaluddin dianggap seorang "rasionalis" sehingga terlalu mengandalkan nalar untuk memahami hal-hal supernatural (Ricklefs, 2013:300-301).

Dalam masa selanjutnya, ketokohan Islam radikal seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir lebih "diperhitungkan" karena mampu membawa fenomena "minoritas" Islam puritan di Solo menjadi sebuah kekuatan diperhitungkan rezim penguasa. Pemikiran dan konsep pandangan keduanya dianggap sebagai "duri lokal" bagi pemerintah Orde Baru. Hal ini disebabkan, pemerintahan saat itu menekankan kebijakan stabilitas politik dan keamanan.

Pemerintah Orde Baru cenderung represif terhadap kekuatan yang mengganggunya. Meskipun demikian, kedua tokoh ini tetap berani menghadapi penguasa dengan segala risikonya. Hal inilah yang dikagumi pengikutnya dan mampu menarik perhatian masyarakat awam atau golongan abangan. Golongan abangan ini tentunya bukan dari kalangan santri di Pesantren Ngruki. Mereka adalah masyarakat awam yang mengikuti kajian keagamaan atau safari dakwah di luar pesantren. Golongan abangan merasa tertarik dengan konten dakwah dan sikap kritis dari Ustaz Abdullah Sungkar. Hal ini merupakan fase awal, mengapa radikalisme Islam mampu lahir dalam masyarakat abangan di Solo, Jawa Tengah.⁸

⁸ Wawancara peneliti dengan Pak Arl (61 Tahun) tanggal 9 Nopember 2020. Pak Arl sebenarnya lahir dan dibesarkan di Jawa Timur, namun ketika dewasa menjadi pengikut Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Meskipun akhirnya menetap di Jawa Barat, namun yang bersangkutan sekitar tahun 1980-an sampai tahun 1990-an sering ke Solo untuk bersilaturahmi dengan da'i idolanya. Rasa kagumnya pada da'i tersebut dapat dibuktikan ketika yang bersangkutan turut serta membantu kedua tokoh melarikan diri ke Malaysia sekitar tahun 1985.

Bagi golongan abangan, dalam konteks ini Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir mampu memberi harapan bagi masyarakat, di saat mereka tertekan oleh rezim Orde Baru. Tekanan rezim kepada golongan abangan yang kritis biasanya dengan cara pemberian label sebagai pendukung PKI. Pelabelan inilah yang paling ditakuti dari golongan abangan, karena pelabelan mempunyai konsekuensi sanksi hukum dan sanksi sosial yang sangat berat. Namun, ketika golongan abangan menjadi pengikut kedua ustaz, mereka merasa aman dan terhindar atas pelabelan. Bagaimanapun, kaum santri adalah musuh utama dari kekuatan komunisme di Indonesia sehingga rezim penguasa tidak akan mampu melakukan pelabelan yang dimaksud.⁹

Bagaimanapun, umat Islam sebagai kekuatan yang paling berjasa atas lahirnya Orde Baru yang berhadapan dengan kekuatan PKI. Tampaknya, ketika Orde Baru berkuasa, mereka telah melupakan umat Islam. Bagaimanapun, kehadiran Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang kritis terhadap pemerintah sebagai "pengingat" agar pemerintah berada di jalur yang benar dan posisi yang adil terhadap rakyatnya. Meskipun kedua ustaz itu bukan dianggap sebagai Ratu Adil ataupun Imam Mahdi, namun golongan abangan menyandarkan harapannya atas keberaniannya melawan kekuasaan represif.¹⁰

Sosok Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dalam skala lokal di Solo dianggap mampu menjadi pemimpin dan memberikan tekanan kepada rezim. Para pengagum dan pengikut Ustaz Abdullah Sungkar di luar dari santri Pesantren Ngruki berasal dari berbagai kalangan dan bersifat heterogen. Mereka berasal dari kalangan santri dan abangan, dan profesi mereka dari buruh, pelajar, mahasiswa, wiraswasta, dan lain-lainnya. Bahkan banyak di antara mereka yang masih awam dalam hal agama. Kelompok semacam ini malah mulai tertarik bahkan menjadi militan dan fanatik terhadap

⁹ Wawancara peneliti dengan Pak Arl (61 Tahun) tanggal 9 Nopember 2020.

¹⁰ Wawancara peneliti dengan Pak Arl (61 Tahun) tanggal 10 Nopember 2020.

pemikiran Ustaz Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir.¹¹ Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat awam yang minim pemahaman agama dapat dengan mudah bertransformasi ke dalam radikalisme jika ada instrumen tertentu, yakni tokoh atau pemimpin yang diidolakan dan kondisi tertentu dalam masyarakat. Keadaan sosial ekonomi seseorang, merupakan variabel penting ketika mereka mudah tertarik dengan radikalisme. Namun, variabel sosial ekonomi saja tentunya tidak cukup karena harus didukung oleh pemikiran atau tokoh tertentu yang mampu mempengaruhi cara pandang sosial-keagamaan seseorang atau kelompok.

Pemerintah menekan kelompok yang dianggap radikal ini dengan memanfaatkan kebijakan "kesakralan" ideologi Pancasila. Rezim pemerintah dan Pancasila dianggap sebagai satu kesatuan. Bagi kelompok yang melawan pemerintah diartikan sebagai kelompok anti-Pancasila. Sebenarnya, kekhawatiran rezim terhadap kebangkitan kekuatan radikalisme Islam di Indonesia juga disebabkan faktor eksternal. Faktor ini terkait dengan pengaruh Revolusi Islam di Iran tahun 1979. Bagaimanapun, sebagian dari kelompok umat Islam anti-Orde Baru, terobsesi dengan apa yang terjadi di Iran. Sebagian dari kelompok ini mengidolakan ketokohan Ayatullah Khomeini yang dicap negara Barat sebagai pemimpin fundamentalisme Islam.¹²

Sementara itu, jaringan radikalisme di Solo pada masa Orde Baru pernah melemah, disebabkan tokoh-tokoh utamanya menjadi target penangkapan penguasa Orde Baru. Pada tahun 1985 Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir terpaksa "mengamankan diri" ke Malaysia sehingga tokoh utama Pesantren Ngruki ini mulai berkurang pengaruhnya di Solo. Terkait pelarian diri kedua ustaz tersebut, pemerintahan Malaysia menganggap, kedua tokoh itu tidak berbahaya bagi negaranya, terkait pandangan keagamaannya. Kedua tokoh ini menetap cukup lama di Malaysia, sehingga jaringan, ide, dan pemikirannya dikembangkan di Malaysia. Selama di

Malaysia, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir tetap melakukan aktivitas dan dakwah dengan pemikiran radikalnya. Sebagai pusat kegiatannya, mereka mendirikan Pesantren Lukman Hakim di Negeri Johor. Pesantren ini mampu eksis, karena pemerintah Malaysia tidak memperlakukan kasus hukum keduanya di Indonesia.

Dengan vakumnya tokoh utama Pesantren Ngruki, pemerintah Orde Baru berusaha ikut campur dalam mengubah pemikiran pesantren. Akibatnya, Pesantren Ngruki mengalami krisis terkait rivalitas kelompok "neorevivalis atau salafi haraki"¹³ bersaing pengaruh dengan kelompok "moderat" tentang orientasi pendidikan. Pemerintah Orde Baru berusaha melakukan intervensi untuk membendung dominasi kelompok salafi haraki dan berusaha membesarkan kelompok moderat dengan berbagai bentuk (Fuaduddin, *et al.* 2003: 51).

Pada tahun 1995 terjadi pergeseran orientasi dari Pesantren Al-Mukmin Ngruki antara kelompok Salafi Haraki (fundamentalis) dengan kelompok moderat dalam menentukan identitas pesantren (Fuaduddin, *et al.* 2003: 43). Beberapa ustaz dari Ngruki yang radikal meninggalkan pesantrennya pada konflik tahun 1995 tersebut, dan mendirikan pesantren yang lebih terbuka dalam mengembangkan paham radikalnya. Pesantren ini didirikan di daerah Boyolali, Lamongan, Rembang, dan Sukoharjo (Wildan, 2014: 303).

Kelompok moderat di Ngruki berusaha menghilangkan stigma radikal agar dapat menarik santri baru sehingga mampu menyehatkan keuangan yang lebih solid (Bruinessen, 2014: 43). Salah seorang tokoh moderat di Ngruki adalah Ustaz Muhammad Amir. Dirinya merupakan pengurus yayasan dan berprofesi sebagai dosen jurusan hukum. Cara dakwah Ustaz Muhammad Amir berapi-api dan penuh bersemangat, namun konten materi dakwahnya sangat moderat dan menyejukkan bagi jamaah. Materi berisi hal-hal terkait permasalahan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan

¹¹ Wawancara peneliti dengan Pak Arl tanggal 11 Nopember 2020

¹² Wawancara peneliti dengan Pak Arl tanggal 11 Nopember 2020

¹³ Salafi haraki dalam pemahaman keagamaan, identik dengan ciri-ciri kelompok fundamentalis yakni corak penafsiran doktrin bersifat rigid dan literal (lihat :Fuaduddin, *et al.*, 2003: 8).

berbangsa dan bernegara, serta hal-hal lain yang menunjukkan bahwa Islam bersinergi dengan pemerintah.¹⁴

Hal yang wajar jika pemerintah berusaha dekat dan mendekati tokoh-tokoh Ngruki yang beraliran moderat. Bahkan di era Orde Baru yang cenderung militeristik, “pemerintah lokal” menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh moderat tersebut. Salah satunya caranya, jika Korem dan Kodim setempat ada acara, maka Ustaz Muhammad Amir atau Ustaz Farid Ma’ruf yang diundang untuk mengisi ceramah (Fuaduddin, *et al.* 2003: 200). Kedekatan hubungan antara K.H. Muhammad Amir dengan pemerintah dapat ditunjukkan ketika istri Presiden Soeharto yakni Ibu Tien Soeharto meninggal dunia di Jakarta tahun 1996. Wafatnya Ibu Tein bersamaan atau berhimpitan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji, yakni wukuf di Arafah dan Idul Adha. Saat ibu negara meninggal di Jakarta, Ustaz Muhammad Amir sedang memimpin rombongan haji di Mekah. Ia diberi amanah oleh pemerintah untuk memimpin sholat gaib. Padahal, saat itu di Mekah juga banyak tokoh atau ulama penting, seperti da’i sejuta umat yakni K.H. Zainnudin M.Z.¹⁵ Pemberian amanat ini sebagai salah satu indikasi, hubungan Ustaz Muhammad Amir dengan pemerintah sangat dekat.

Ketika rezim Orde Baru tumbang, pengaruh salafi di Pesantren Ngruki menguat kembali seiring kedatangan tokoh utamanya dari Malaysia. Sebaliknya, tokoh-tokoh moderat mulai pudar pengaruhnya. Radikalisme Islam di Solo mengalami peningkatan luar biasa sejak era Reformasi. Hal ini sebagai sebuah paradoks, mengingat karakter masyarakatnya cenderung golongan abangan dan Muslim taat hanya berjumlah kecil. Jika demikian, Islam garis keras tentunya kurang banyak mendapat tempat dan dukungan (Wildan, 2014: 268).

¹⁴ Peneliti beberapa kali mengundang K.H. Muhammad Amir antara tahun 1994-1997, untuk mengisi ceramah di sebuah masjid di Solo, di mana peneliti pernah menjadi pengurusnya.

¹⁵ Infomasi ini diberikan langsung oleh K.H. Muhammad Amir S.H kepada peneliti pada sekitar akhir tahun 1996 ketika peneliti menjadi pengurus dan aktivis masjid di Solo. Saat itu peneliti sedang menjemput yang bersangkutan untuk mengisi pengajian akbar di masjid di mana peneliti pernah menjadi pengurusnya.

D. Penutup Simpulan

Selama ini, wilayah Solo di Jawa Tengah dianggap basis gerakan radikalisme keagamaan di Indonesia. Jika melihat sejarahnya, dinamika dakwah Islam puritan dimulai setelah peristiwa G30S tahun 1965. Hal ini disebabkan, kekuatan PKI lokal yang dominan di Solo menganggap umat Islam atau pendukung partai Islam sebagai lawan. Dengan tumbangannya kekuatan PKI, tokoh utama partai Islam yang sudah dibubarkan Sukarno, yakni Natsir menjalin hubungan dengan tokoh dari Solo yakni Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir. Melalui tokoh-tokoh inilah, gerakan Islam puritan di Solo menjadi tumbuh dan berkembang.

Pada era awal Orde Baru, tokoh lokal Islam yang dicap oleh Orde Baru sebagai penganut paham radikal yakni Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir mulai mendapat pengikut dari masyarakat yang berada di luar pesantren. Pengikut-pengikut ini bersifat kompleks dari berbagai kalangan, bukan hanya kaum santri namun juga golongan abangan. Hal ini disebabkan kedua ustaz ini berani melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap semi-otoriter yakni Orde Baru. Gerakan ini semakin meningkat pada masa Reformasi.

Daftar Pustaka.

- Ahmad, Tsabit Azinar. 2016. “Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955.” *Paramita: Historical Studies Journal*, 26 (1): 45-61.
- Azra, Azyumardi. 2002. Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara. Bandung: Mizan
- Azra, Azyumardi. 2006. Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana & Kekuasaan. Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung
- Bruinessen, Martin van. 2014. Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan “Conservative Turn” Awal Abad Ke-21 (Dalam Buku: Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme). Bandung: Mizan
- Fahrizal, Adif. 2014. Dinamika Hubungan Muslim-Kristen di Surakarta, 1999-

2000. *Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014. Jurnal UIN Sumatra Utara
- Fahrizal, Adif. 2020. Islamisasi di Kota Surakarta dan Sekitarnya Masa Orde Baru: Sebuah Tinjauan Awal. *Jurnal Lembaran Sejarah Volume 16 Number 1*, April 2020. Yogyakarta: UGM
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilu 1955 di Indonesia*, Jakarta: KPG
- Fuaduddin & Soemanto & Kastuba, Muchtamil. 2003. *Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Solo: Studi Tentang Sistem Pendidikan Paham Keagamaan dan Jaringan*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah (Pengantar Metode Sejarah)*, Terjemahan. Nugroho Notosutanto, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haryanto. 1991. "Peranan Partai Politik Pada Sistem Politik Indonesia Periode 1945- 1959". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jinan, Mutohharun. 2014. *Melacak Akar Ideologi Puritanisme Islam: Survei Biografi atas "Tiga Abdullah"*. *Jurnal Walisongo Volume 22, Nomor 2*, November 2014.
- Muhammad, Afif. 2013. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: Penerbit MARJA
- Mulyadi, M. Hari & Soedarmono & Setiyadi, Abraham & Utomo, Hari D & Wahyudiono, Rohadi Didiek & Tamam, Tatang Badru & Amin, M. 1999. *Runtuhnya Kekeuasaan "Kraton Alit"*. Surakarta: LPTP Surakarta.
- Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Ricklefs, M.C. 2013. *Mengislamkan Jawa*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Saerozi, M. 2004. *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Terjemahan : Hilmar Farid)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sutiyah. 2017. *Kehidupan Politik Di Kota Surakarta dan Yogyakarta Menjelang Pemilihan Umum 1955*. *Jurnal Paramita: Historical Studies Journal*, 27 (2). Unnes Semarang
- Wildan, Muhammad. 2014. *Memetakan Islam Radikal: Studi Atas Suburnya Gerakan Islam Radikal di Solo, Jawa Tengah (Dalam Buku: Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme)*. Bandung: Mizan